



Dedicated:
Journal of Community Services
(Pengabdian kepada Masyarakat)
<https://ejournal.upi.edu/index.php/dedicated/>



The digitization of cassette archives in the House of Representatives of the Republic Indonesia

Najwa Nabila

Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

najwanabila072@upi.edu

ABSTRACT

Archives are recordings of information with historical, administrative, and legal value that must be preserved to maintain the sustainability of information. In the House of Representatives of the Republic of Indonesia, cassette archives containing meeting recordings hold significant value as inactive dynamic documents that require proper management. The media transfer of archives, especially from analog cassettes to digital formats, is an effective solution to increase accessibility, extend the lifespan of archives, and promote transparency within legislative institutions. This service employs a mentoring method conducted by practitioners, after which the practical results are analyzed following regulations governing media transfer and research on related topics. The service results indicate that the primary challenges in media transfer are technological limitations, physical degradation of cassettes, and a lack of understanding of standards and regulations among employees. The proposed solutions include investing in modern technology, conducting routine physical maintenance of cassettes, and training employees to understand the guidelines for transferring archive media. Proper implementation of this process supports the preservation of archives and facilitates access to information for various parties so that archives remain relevant and valuable in the digital era.

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 17 Jan 2025

Revised: 16 Apr 2025

Accepted: 20 Apr 2025

Available online: 9 May 2025

Publish: 27 Jun 2025

Keyword:

archive management; cassettes
archives; digitization; media
conversion of archives

Open access

Dedicated: Journal of Community
Services (Pengabdian kepada
Masyarakat) is a peer-reviewed open-
access journal

ABSTRAK

Arsip merupakan rekaman informasi yang memiliki nilai historis, administratif, dan legal yang perlu dilestarikan untuk menjaga keberlangsungan informasi. Dalam konteks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, arsip kaset yang berisi rekaman rapat memiliki nilai penting sebagai dokumen dinamis inaktif yang harus dikelola dengan baik. Alih media arsip, terutama dari kaset analog ke format digital, menjadi solusi efektif untuk meningkatkan aksesibilitas, memperpanjang umur arsip, dan mendukung transparansi lembaga legislatif. Pengabdian ini menggunakan metode mentoring yang dilakukan oleh praktisi, kemudian hasil praktis yang dilakukan dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan mengenai alih media dan penelitian dengan topik terkait. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam alih media adalah keterbatasan teknologi, degradasi fisik kaset, serta kurangnya pemahaman standar dan regulasi oleh pegawai. Solusi yang diusulkan meliputi investasi teknologi modern, perawatan fisik kaset secara rutin, serta pelatihan pegawai untuk memahami pedoman alih media arsip. Implementasi yang tepat terhadap proses ini mendukung pelestarian arsip dan mempermudah akses informasi bagi berbagai pihak, sehingga arsip tetap relevan dan bermanfaat di era digital.

Kata Kunci: alih media arsip; arsip kaset, digitalisasi; pengelolaan arsip

How to cite (APA 7)

Nabila, N. (2025). The digitization of cassette archives in the House of Representatives of the Republic Indonesia. *Dedicated: Journal of Community Services (Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 47-56.

Peer review

This article has been peer-reviewed through the journal's standard double-blind peer review, where both the reviewers and authors are anonymised during review.

Copyright

2025, Najwa Nabila. This an open-access is article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author, and source are credited. *Corresponding author: najwanabila072@upi.edu

INTRODUCTION

Pengelolaan arsip di zaman sekarang menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Arsip diibaratkan sebagai nyawa atau legalitas dari keberlangsungan suatu organisasi. Arsip adalah rekaman informasi yang memiliki nilai historis, administratif, atau legal yang disimpan sebagai bukti kegiatan suatu organisasi atau individu. Arsip berperan penting dalam menjaga keberlangsungan informasi, baik untuk keperluan operasional maupun sebagai sumber sejarah di masa depan (Faturrahman, 2018). Di era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi dan informasi melaju dengan sangat pesat. Perkembangan tersebut memberikan dampak yang signifikan pada kebutuhan informasi yang semakin beragam. Dalam konteks pengelolaan arsip, perkembangan teknologi dan informasi tersebut berdampak pada kompleksitas pengelolaan arsip seperti munculnya berbagai format file penyimpanan arsip, meningkatnya ancaman terhadap keamanan data dan informasi yang terkandung di dalam sebuah arsip, dan meningkatnya volume arsip yang menyebabkan kompleksitas dalam pengelolaannya (Darmansah *et al.*, 2024).

Salah satu jenis arsip yang memiliki peran strategis adalah arsip yang dihasilkan oleh lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Arsip DPR RI mencakup dokumen-dokumen penting, seperti risalah rapat, undang-undang, dan berbagai dokumen lainnya yang menjadi landasan tata kelola pemerintahan. Arsip ini tidak hanya menjadi bukti tanggung jawab DPR RI kepada publik, tetapi juga menjadi bahan kajian yang berharga bagi akademisi, peneliti, dan masyarakat untuk memahami dinamika politik dan legislasi di Indonesia. Dalam upaya menjaga keberlanjutan arsip dan meningkatkan aksesibilitasnya, alih media arsip menjadi solusi yang signifikan. Proses alih media, seperti digitalisasi dokumen, memungkinkan arsip disimpan dalam format elektronik yang lebih tahan lama dan mudah diakses. Khusus untuk arsip DPR RI, alih media tidak hanya membantu melestarikan dokumen yang berisiko rusak akibat usia atau faktor lingkungan, tetapi juga mempermudah distribusi informasi kepada publik, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif (Shekgola & Ngoepe, 2025).

Arsip kaset di lembaga DPR RI yang dialih media merupakan arsip dinamis inaktif. Kaset-kaset tersebut berisi rekaman rapat yang dilakukan oleh anggota DPR RI. Untuk menjaga nilai informasi yang terkandung di dalam arsip kaset tersebut perlu dilakukan pelestarian arsip. Pelestarian arsip dinamis dapat dilakukan melalui preservasi preventif, yang mencakup tindakan untuk mencegah kerusakan, seperti pengendalian lingkungan dan perawatan rutin (Khaeruddin *et al.*, 2023). Selain itu, penting untuk melakukan alih media dengan mendigitalisasi arsip agar dapat diakses dengan mudah dan perpanjangan umur arsip. Penyimpanan yang baik di lingkungan yang sesuai serta perawatan berkala pada arsip yang menunjukkan tanda kerusakan juga merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian arsip dinamis di era teknologi digital. Digitasi arsip dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi yang terkandung di dalam arsip, dan melindungi arsip dari risiko kerusakan seperti tinta memudar, kertas menguning, dan lain-lain (Kartikasari *et al.*, 2024). Digitasi arsip dapat menjadi salah satu upaya dalam pelestarian arsip yang memiliki nilai sejarah agar dapat dikelola dengan baik dan bisa diakses di masa depan oleh generasi berikutnya (Azizah & Nalole, 2023). Selain itu, pengelolaan arsip digital dapat membantu dalam mempercepat proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja pegawai, dan mengatasi masalah penyimpanan fisik (Priatna, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, artikel ini mengkaji mengenai proses dan tantangan digitasi arsip kaset di DPR RI. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses alih media arsip kaset DPR RI dan tantangan yang dihadapi dalam melakukan alih media arsip kaset.

Literature Review

Digitasi Arsip

Digitasi atau alih media arsip merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengubah arsip yang berbentuk konvensional menjadi arsip yang dapat diakses dalam format digital (Lolytasari & Dirsanala, 2023). Proses ini bertujuan untuk mempermudah akses terhadap arsip kapanpun dan di manapun. Digitasi juga dapat membantu pelestarian arsip dari media yang mungkin mengalami kerusakan seiring waktu, sehingga arsip yang bernilai sejarah tetap terjaga dan dapat diakses oleh masyarakat (Siregar, 2019). Selain itu, digitasi mendukung efisiensi dalam pengelolaan arsip, memungkinkan penyimpanan yang lebih aman, dan meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pengguna.

Konsep digitasi arsip tidak hanya berfokus pada proses transformasi bentuk fisik arsip ke dalam bentuk digital, namun juga melibatkan pengelolaan sistem arsip yang terintegrasi seperti pengelolaan arsip elektronik hasil proses digitasi (Henriksen-Hagen, 2023). Arsip-arsip yang telah didigitasi perlu dikelola lebih lanjut dengan sistem yang terintegrasi, seperti aplikasi SRIKANDI. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan aplikasi pengelolaan arsip yang terintegrasi di lingkungan instansi pemerintah yang dikembangkan oleh ANRI. Jadi arsip-arsip yang telah didigitasi disimpan di dalam aplikasi kearsipan yang terintegrasi agar dapat dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan digitasi atau alih media diperlukan pedoman peraturan pelaksanaan. Hal tersebut diperlukan agar arsip yang telah digitasi dapat dijamin keasliannya dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Rodin *et al.*, 2022). Proses alih media arsip di DPR RI berpedoman pada Bab V Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pentingnya Melakukan Digitasi Arsip

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai unsur penunjang DPR RI. Pada saat anggota dewan menjalani tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPR RI berperan dalam memberikan bantuan teknis, administratif, dan keahlian kepada anggota dewan (Noviar *et al.*, 2024). Salah satu unsur alat kelengkapan dewan dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah arsip. Arsip yang ada di DPR RI merupakan arsip legislatif. Arsip-arsip tersebut memiliki peranan yang sangat penting bagi DPR RI. Salah satu jenis arsipnya adalah arsip kaset dinamis inaktif. Rekaman arsip kaset yang ada di DPR RI kebanyakan berisi rekaman mengenai rapat dan persidangan yang ada di DPR RI. Oleh karena itu, digitasi arsip kaset dinamis inaktif memiliki peranan yang sangat penting bagi DPR RI. Dengan melakukan digitasi arsip kaset, DPR RI dapat melestarikan informasi-informasi yang mengandung nilai sejarah pada arsip kaset tersebut (Prabowo & Rukiyah, 2019).

Digitasi arsip kaset juga dapat memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat (Cunningham & Phillips, 2005). Arsip-arsip yang telah didigitasi kemudian diolah lagi untuk dimasukkan ke dalam suatu sistem yang terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat melalui platform *online* (Moles, 2022). Namun, untuk beberapa arsip yang sifatnya terbatas dan rahasia, hanya bisa diakses apabila terdapat permintaan yang disertai surat permohonan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Digitasi arsip juga memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap efisiensi pengelolaan arsip. Dalam lingkup pemerintahan, digitasi arsip membantu dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam mencari informasi, mengurangi penggunaan ruangan fisik untuk menyimpan arsip, dan memberikan kesempatan antar instansi pemerintahan untuk berkolaborasi sehingga mempermudah proses audit atau pengawasan arsip (Mosweu & Ngoepe, 2021). Selain itu, digitasi arsip juga memudahkan pegawai dalam melakukan

transfer informasi arsip secara *online*. Proses transfer informasi arsip secara *online* tersebut dapat menghemat biaya karena tidak perlu menggunakan kertas dan tidak memerlukan fasilitas ruang penyimpanan fisik, dan meningkatkan efisiensi kerja pegawai (Lian *et al.*, 2022).

Peran Arsiparis Dalam Pengelolaan Arsip Digital

Dalam pengelolaan arsip digital, pasti tidak luput dengan peranan arsiparis. Arsiparis memegang peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan pengelolaan arsip digital. Arsiparis bertanggung jawab dalam mengelola arsip yang ada di lembaga atau institusi, dan melakukan pemeliharaan arsip (Ardyawin, 2017; Putri, 2022). Sebelum melakukan pengelolaan dan pemeliharaan, arsiparis harus memiliki kompetensi dan keterampilan dalam melakukan pengelolaan digital sehingga aksesibilitas informasi dapat berjalan dengan efisien serta arsiparis mampu menghadapi tantangan-tantangan pengelolaan arsip digital (Netshakhuma, 2021).

Arsiparis juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip digital (Packalén & Partanen, 2024). Integrasi teknologi dan informasi pada pengelolaan arsip digital sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, mempermudah pegawai dalam melakukan penelusuran arsip, mendukung pelestarian arsip, dan memastikan bahwa arsip yang telah didigitasi dapat diakses oleh masyarakat (Kallberg, 2012; Setiawati *et al.*, 2022). Sistem keamanan arsip juga menjadi tanggung jawab arsiparis dalam pengelolaan arsip digital. Arsiparis berperan dalam menetapkan kontrol akses, mengamankan informasi sensitif, mengamankan informasi yang dilindungi hak cipta, dan memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi tertentu (Kalarikkal *et al.*, 2024). Maka dari itu, sistem informasi *website* yang baik dan mudah untuk dioperasikan oleh arsiparis juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pengelolaan arsip (Setiawati *et al.*, 2024).

METHODS

Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah mentoring yang dilakukan oleh praktisi. Mentoring melibatkan sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan pengalaman secara langsung yang diperoleh dari praktisi mengenai aktivitas yang menjadi fokus selama kegiatan pengabdian dilakukan. Data yang digunakan pada artikel ini dikumpulkan melalui metode observasi yang dilakukan selama melakukan alih media sembilan arsip kaset RUU Pornografi Tahun 2008 pada kegiatan magang. Prosedur pertama yang dilakukan adalah melakukan praktik langsung alih media arsip kaset di DPR RI. Prosedur kedua adalah melakukan observasi selama melakukan praktik alih media. Prosedur ketiga adalah mencatat informasi yang telah terkumpul kemudian diolah menjadi laporan sementara. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis yang diperkuat dengan peraturan-peraturan mengenai alih media, dan penelitian dengan topik serupa.

RESULTS AND DISCUSSION

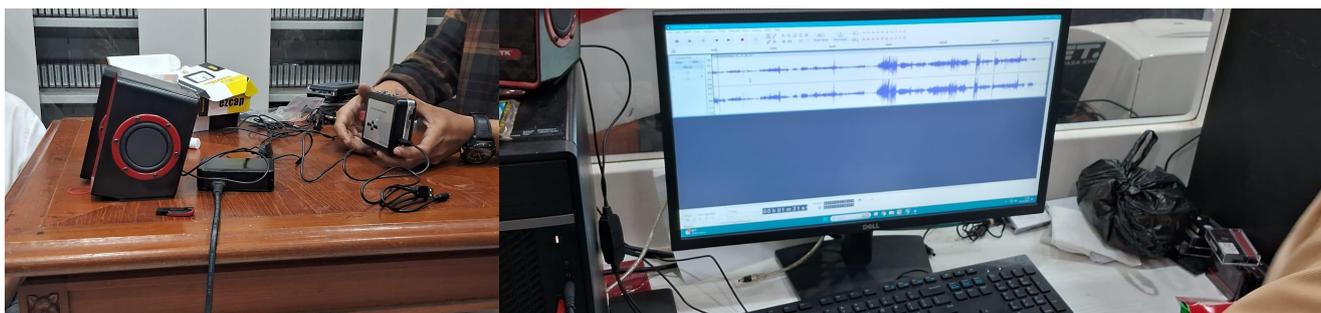
Results

Proses Alih Media Arsip Kaset DPR RI

Menurut Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media, alih media didefinisikan sebagai kegiatan pengalihan media arsip dari satu jenis media ke media lainnya dalam

rangka memudahkan akses arsip. Sejalan dengan pengertian di atas, alih media merupakan kegiatan pemindahan informasi dari bentuk tekstual ke elektronik tanpa mengurangi isi informasinya, dengan catatan media baru yang digunakan menjamin bahwa hasilnya lebih efisien dan efektif (Arwana *et al.*, 2024).

Mekanisme alih media arsip diatur dalam pasal 17, yaitu melakukan seleksi atau penilaian arsip, melakukan proses alih media, membuat berita acara dan daftar arsip hasil alih media, dan melakukan autentikasi arsip hasil alih media. Proses seleksi atau penilaian arsip dilakukan dengan cara memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi yang terkandung di dalamnya. Terdapat tiga kriteria arsip yang harus dialih mediakan, yaitu 1) Arsip dengan kondisi rapuh/rentan mengalami kerusakan secara fisik; 2) Arsip elektronik dengan format data versi lama yang perlu diperbarui dengan versi baru; 3) Informasi yang terdapat dalam media lain di mana media tersebut secara sistem tidak diperbarui lagi karena perkembangan teknologi.



Gambar 1. Proses Alih Media
Sumber: Dokumentasi Penulis 2024

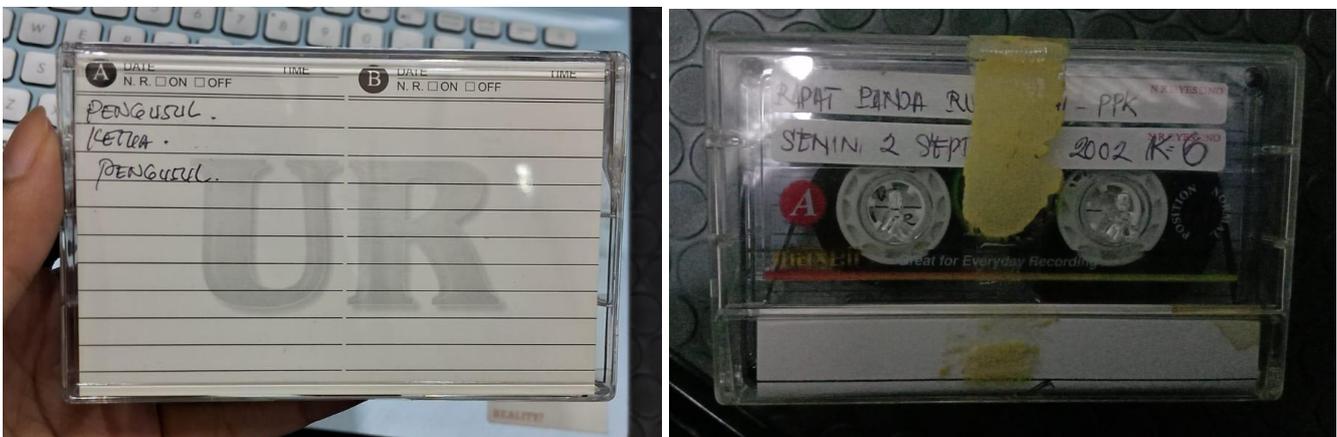
Gambar 1 memperlihatkan proses alih media yang dilakukan. Dalam melakukan alih media arsip, diperlukan metode untuk mempermudah prosesnya. Pada pasal 9 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media terdapat tiga metode yang digunakan dalam melakukan alih media, yaitu pemindaian, konversi, dan migrasi. Pemindaian biasanya dilakukan pada arsip konvensional berbentuk kertas. Konversi digunakan untuk mengubah *file* awal berupa *text*, *image*, audio analog, video analog menjadi bentuk *file* lain. Migrasi digunakan untuk memindahkan atau mentransformasikan data dari suatu konteks ke konteks lainnya yang berbeda bentuk/struktur data sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Metode yang digunakan pada alih media arsip kaset adalah metode konversi. Arsip-arsip kaset yang berbentuk audio analog dikonversi dengan menggunakan alat pembaca MP3 *player* dan komputer ke dalam bentuk digital atau MP3.

Setelah arsip-arsip kaset tersebut dialih media, selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara dan daftar arsip yang telah dialih media. Pembuatan berita acara dan daftar arsip setelah melakukan alih media arsip kaset merupakan langkah penting untuk mendokumentasikan proses alih media secara resmi, memastikan keabsahan serta keakuratan informasi arsip yang telah dialihkan, dan memudahkan penelusuran arsip di masa mendatang. Kemudian setelah itu arsip yang telah dialih media diautentifikasi. Proses autentifikasi arsip yang telah dialih media adalah langkah penting untuk memastikan bahwa arsip hasil alih media memiliki kesesuaian dan keaslian dengan arsip asli, sehingga dapat diakui secara hukum dan memenuhi standar keabsahan dalam pengelolaan arsip (Sutrisno & Christiani, 2019).

Tantangan

Salah satu tantangan utama dalam alih media arsip kaset adalah keterbatasan teknologi dan peralatan yang sesuai. Banyak kaset menggunakan format yang sudah usang, sehingga sulit menemukan perangkat pemutar yang kompatibel (lihat **Gambar 2**). Selain itu, kualitas peralatan yang rendah dapat mengurangi keakuratan hasil alih media. Tantangan ini juga semakin kompleks karena keberhasilan alih media tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kompetensi sumber daya manusia dalam yang terlibat (Martini, 2021). Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah ada beberapa kaset yang mengalami degradasi fisik, seperti pita yang aus, pecah, atau kehilangan kualitas suara. Dari total sembilan kaset yang dialih media, terdapat lima kaset yang mengalami degradasi fisik seperti terdapat bekas lem yang menempel pada *casing* kaset, dan terdapat 1 kaset yang tidak dapat diputar karena pita kaset berjamur.

Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan inventarisasi perangkat yang diperlukan dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki teknologi khusus untuk membaca format lama. Selain itu, investasi dalam peralatan modern yang dapat mendigitalkan berbagai format kaset juga sangat penting untuk mendukung proses ini. Di samping pengadaan teknologi perlu dilakukan juga pelatihan, sosialisasi dan edukasi bagi pihak-pihak terkait mengenai pengelolaan arsip digital. Kegiatan ini dapat mencakup simulasi dalam mempraktikkan pengelolaan arsip digital, langkah-langkah penyimpanan arsip digital, serta pemberian pemahaman mengenai keuntungan dengan pengelolaan arsip digital (Rahmayanti *et al.*, 2022).



Gambar 2. Kaset Rusak dan Kaset dengan Noda Bekas Lem pada Kaset
Sumber: Dokumentasi Penulis 2024

Kondisi ini dapat menyulitkan proses pengalihan ke media digital tanpa kehilangan informasi penting. Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan perawatan kaset secara rutin seperti membersihkan pita kaset, menjaga suhu ruangan penyimpanan kaset, dan menggunakan alat perekat yang tidak meninggalkan bekas pada *casing* kaset. Pemeliharaan dan preservasi arsip di lingkungan DPR RI harus diperhatikan dengan serius. Hal tersebut perlu dilakukan karena arsip dapat menjadi warisan budaya bagi generasi selanjutnya, untuk menjaga usia informasi yang terkandung di dalam arsip, dan mencegah kerusakan pada arsip-arsip penting yang berkaitan dengan urusan kenegaraan (Rakemane & Mosweu, 2021).

Tantangan lain adalah kurangnya pemahaman atau penerapan standar dan regulasi dalam proses alih media. Ada beberapa pegawai Bagian Arsip DPR RI yang masih belum memahami pedoman alih media arsip yaitu Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media. Hal tersebut dapat menyebabkan arsip yang dialih media tidak memenuhi standar dan diragukan keasliannya

serta menyulitkan proses integrasi ke dalam sistem pengelolaan arsip digital. Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan melakukan pembinaan terkait peraturan alih media, dan mengemas ulang informasi mengenai peraturan alih media ke dalam media informasi yang lebih mudah dipahami.

Tantangan yang terakhir adalah pegawai kurang memahami penggunaan teknologi untuk alih media. Rekomendasi solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan pendampingan dalam penggunaan teknologi alih media. Pendampingan penggunaan teknologi dapat memberikan dampak yang sangat bagus bagi pengelolaan arsip di Bagian Arsip DPR RI, yaitu meningkatkan kapasitas pegawai dalam melakukan pengelolaan arsip digital, pegawai memiliki kesadaran dan keterampilan dalam mengelola keamanan informasi arsip digital, dan dapat mengasah kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan pada pengelolaan arsip digital (Ilhadi *et al.*, 2024).

Pengembangan dan peningkatan kemampuan arsiparis sangat dibutuhkan dalam pengelolaan arsip, terutama arsip digital. Arsiparis perlu mempelajari kebijakan terkait digitasi arsip agar arsip-arsip yang telah dialih media dapat dijamin keasliannya dan prosedurnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu pengembangan dan peningkatan kemampuan arsiparis di bidang teknologi dan informasi juga sangat diperlukan agar arsiparis dapat mengintegrasikan arsip-arsip secara *online* dan memberikan kemudahan aksesibilitas arsip secara *online* kepada masyarakat (Johare & Noorman-Masrek, 2011).

Discussion

Proses alih media arsip kaset yang dilakukan oleh DPR RI merupakan langkah penting dalam upaya melestarikan arsip yang memiliki nilai sejarah dan administratif. Arsip kaset yang berisi rekaman rapat dan sidang DPR RI memiliki nilai dokumenter yang tak ternilai bagi pemahaman politik dan legislasi di Indonesia. Digitalisasi arsip kaset tersebut tidak hanya mengurangi risiko kerusakan fisik, seperti degradasi pita kaset yang dapat menyebabkan hilangnya informasi, tetapi juga meningkatkan efisiensi aksesibilitas arsip bagi publik. Dengan mengubah format fisik arsip menjadi digital, informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses lebih mudah dan lebih cepat, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif (Čtvrtník, 2021; Hersperger *et al.*, 2022). Namun, pelaksanaan alih media arsip kaset ini tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan teknologi yang tersedia, mengingat banyaknya arsip kaset yang menggunakan format lama yang tidak lagi didukung oleh perangkat modern. Hal ini berpotensi menghambat proses alih media dan menyebabkan kualitas informasi yang dipindahkan tidak sepenuhnya akurat. Penting bagi DPR RI untuk berinvestasi pada peralatan digital yang lebih canggih dan berkoordinasi dengan pihak ketiga yang memiliki teknologi untuk membaca format lama, guna memastikan bahwa proses digitalisasi dapat dilakukan dengan hasil yang optimal.

Tantangan lainnya dalam proses alih media arsip kaset adalah degradasi fisik pada arsip kaset itu sendiri. Kaset yang telah berusia lama rentan terhadap kerusakan seperti pita yang aus, berjamur, atau bahkan *casing* yang rusak (Bressan & Canazza, 2013). Kerusakan kaset dapat mempengaruhi kualitas rekaman yang tersimpan dan menyulitkan proses digitalisasi (Cain *et al.*, 2021). Penting untuk melakukan perawatan preventif terhadap arsip kaset, termasuk pemeliharaan rutin dan penyimpanan dalam kondisi yang sesuai, agar kondisi fisik arsip dapat dipertahankan (Rakemane & Mosweu, 2021). Dengan perawatan yang baik, arsip kaset dapat bertahan lebih lama sebelum akhirnya dilakukan proses alih media, sehingga mengurangi potensi kerusakan yang lebih parah. Di sisi lain, meskipun alih media menawarkan berbagai keuntungan, terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan penerapan peraturan yang berlaku terkait pengelolaan arsip digital. Sebagai contoh, masih terdapat pegawai di bagian arsip DPR RI yang belum sepenuhnya memahami pedoman alih media sebagaimana diatur dalam Peraturan

Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020. Kurangnya pemahaman tentang peraturan ini berisiko menghasilkan arsip yang tidak memenuhi standar dan menghambat integrasi arsip digital ke dalam sistem pengelolaan arsip yang lebih luas. Perlu ada pelatihan dan pembinaan yang intensif bagi para pegawai arsip agar mereka dapat mengelola arsip digital dengan lebih efisien dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal pengelolaan arsip digital, proses alih media di DPR RI dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan arsip yang sah, dapat diakses, dan aman untuk kepentingan publik.

CONCLUSION

Proses alih media arsip di DPR RI, terutama untuk arsip kaset yang berisi rekaman rapat dan persidangan, menjadi langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan informasi yang memiliki nilai sejarah dan administratif. Digitasi arsip kaset tidak hanya mengurangi risiko kerusakan fisik seperti degradasi pita kaset, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas arsip bagi publik dengan menyediakan format digital yang lebih efisien dan dapat diakses kapan saja. Dengan menggunakan metode konversi, arsip-arsip yang sebelumnya hanya dapat diakses secara fisik kini dapat dengan mudah diakses dalam format digital melalui sistem terintegrasi, yang mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif.

Beberapa masalah utama yang dihadapi termasuk keterbatasan teknologi yang tersedia untuk mengonversi arsip kaset dengan format lama serta degradasi fisik pada beberapa arsip kaset yang menghambat digitalisasi secara optimal. Di samping itu, kurangnya pemahaman tentang peraturan yang berlaku dan penerapan teknologi oleh pegawai di bagian arsip juga menjadi kendala dalam mengelola arsip digital secara efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dalam teknologi yang lebih canggih serta pelatihan intensif bagi pegawai arsip untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan arsip digital, agar proses alih media dapat berjalan lancar dan menghasilkan arsip yang dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh masyarakat. Dengan implementasi yang tepat, alih media arsip kaset tidak hanya menjaga kelestarian informasi, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas DPR RI dalam pengelolaan arsip. Upaya ini sekaligus memperkuat keberlanjutan arsip sebagai sumber referensi dan dokumentasi bagi publik, peneliti, maupun pemerintah.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

REFERENCES

- Ardyawin, I. (2017). Kompetensi arsiparis dalam pengelolaan kearsipan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 2(1), 33-45.
- Arwana, N. Y., Batubara, A. K., & Fathurrahman, M. (2024). Alih media arsip sebagai upaya preservasi di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labuhanbatu Utara. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2), 1-17.
- Azizah, I. N., & Nalole, S. R. (2023). Digitasi: Sebagai upaya penyelamatan arsip pandemi covid-19. *Humanitis: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, 1(6), 779-785.

- Bressan, F., & Canazza, S. (2013). A systemic approach to the preservation of audio documents: Methodology and software tools. *Journal of Electrical and Computer Engineering*, 6(1), 1-21.
- Cain, S., Welch, B., Oelschlager, A., & VandeCreek, D. (2021). Some assembly required: Low-cost digitization of materials from magnetic tape formats for preservation and access. *Preservation, Digital Technology & Culture (PDT&C)*, 49(3), 89-98.
- Čtvrtník, M. (2021). Closure periods for access to public records and archives. *Comparative-historical analysis. Archival Science*, 21(4), 317-351.
- Cunningham, A., & Phillips, M. (2005). Accountability and accessibility: Ensuring the evidence of e-governance in Australia. *Aslib Proceedings*, 57(4), 301-317.
- Darmansah, T., Nur, A. M., Suryadi, H. S., & Nurarfiansyah, L. T. (2024). Tantangan dan solusi dalam pengelolaan arsip di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(1), 16-20.
- Fathurrahman, M. (2018). Pentingnya arsip sebagai sumber informasi. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 3(2), 215-225.
- Henriksen-Hagen, D. (2023). The effect of digitalization on the daily use of and work with records in the Norwegian Public Sector. *Records Management Journal*, 33(3), 105-119.
- Hersperger, A. M., Thurnheer-Wittenwiler, C., Tobias, S., Folvig, S., & Fertner, C. (2022). Digitalization in land-use planning: Effects of digital plan data on efficiency, transparency and innovation. *European Planning Studies*, 30(12), 2537-2553.
- Johare, R., & Noorman-Masrek, M. (2011). Malaysian archival heritage at risk?: A survey of archivists' knowledge and skills in managing electronic records. *Library Review*, 60(8), 685-711.
- Kalarikkal, S. A., Thamilvanan, G., & Kaluvilla, B. B. (2024). Enhancing access to missionary archives: The role of digital libraries and online repositories. *Library Hi Tech News*, 1(1), 1-10.
- Kallberg, M. (2012). Archivists 2.0: Redefining the archivist's profession in the digital age. *Records Management Journal*, 22(2), 98-115.
- Kartikasari, H., Ibad, I., Ni'mah, F. U., Dirgatama, C. H. A., Kusumawardhani, A., Jayanti, I. S. D., & Khadija, M. A. (2024). Digitasi Family records sebagai upaya penyelamatan arsip di Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. *Semar (Jurnal Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni bagi Masyarakat)*, 13(2), 339-346.
- Khaeruddin, Afdalia, N., & Mustari, U. A. (2023). Pelestarian arsip di era teknologi digital. *Amarthapura: Historical Studies Journal*, 2(2), 63-73.
- Lian, Z., Wang, N., & Oliver, G. (2022). Information culture and recordkeeping: A case of Chinese enterprises. *Journal of Documentation*, 78(5), 973-995.
- Lolytasari, L., & Dirsanala, A. (2023). Digitalisasi arsip dalam mendukung pelaksanaan e-government. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 15(1), 18-30.
- Martini, T. (2021). Pengelolaan arsip elektronik. *Jurnal Komputer Bisnis*, 14(1), 12-20.
- Moles, N. (2022). Preservation for diverse users: Digital preservation and the "Designated Community" at the Ontario Jewish Archives. *Journal of Documentation*, 78(3), 613-630.

- Mosweu, O., & Ngoepe, M. (2021). Trustworthiness of digital records in government accounting system to support the audit process in Botswana. *Records Management Journal*, 31(1), 89-108.
- Netshakhuma, N. S. (2021). Responsibilities of archivist now and in the future as the result of COVID - 19; Case of ICA-SUV. *Digital Library Perspectives*, 37(1), 39-53.
- Noviar, M. H., Syarif, H., & Rahmawati, E. (2024). Penerapan Model Kirkpatrick level reaksi untuk evaluasi program pelatihan manajemen arsip dinamis di Pusbangkom SDM Legislatif Setjen DPR RI. *Jurnal Kewidyaiswaraan*, 9(1), 51-60.
- Packalén, S., & Partanen, L. (2024). Competencies, skills, and personal attributes in job advertisements for archivists and records managers in Finland. *Records Management Journal*, 34(2), 1-16.
- Prabowo, A. B., & Rukiyah, R. (2020). Digitalisasi arsip foto Indonesian visual art archive dalam rangka melestarikan arsip foto di Indonesian Visual Art Archive Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(2), 71-80.
- Priatna, Y. (2021). Peran pengelolaan arsip digital Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam upaya peningkatan kualitas administrasi universitas. *Jurnal Pustaka Budaya*, 8(2), 64-73.
- Putri, F. A. (2022). Peran arsiparis dalam pengelolaan otomasi arsip di era digital. *Abdi Pustaka: Jurnal Perpustakaan dan Kearsipan*, 2(2), 53-57.
- Rahmayanti, Desthiani, U., & Rufeidah, A. (2022). Pengenalan pengelolaan arsip digital untuk meningkatkan pelayanan prima. *Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 198-209.
- Rakemane, D., & Mosweu, O. (2021). Challenges of managing and preserving audio-visual archives in archival institutions in Sub Saharan Africa: A literature review. *Collection and Curation*, 40(2), 42-50.
- Rodin, R., Khotimah, K., Perdana, M., & Mahfiro, R. D. (2022). Kebijakan pengelolaan arsip perguruan tinggi Islam di era industri 4.0 (studi pada Record Center Institut Agama Islam Negeri Curup). *Al-Kuttab: Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan*, 4(1), 1-17.
- Setiawati, L., Aulia, E. S., Johan, R. C., Hadiapurwa, A., & Ardiansah, A. (2022). Studi analisis website Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) Universitas Pendidikan Indonesia dengan metode WebQual 4.0. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 15(1), 84-97.
- Setiawati, L., Hadiapurwa, A., Santoso, B., Nugraha, H., & Rusli, R. P. (2024). Importance-Performance Analysis of SENERGI UPI website user satisfaction. *Jurnal Edutech Undiksha*, 12(1), 20-27.
- Shekgola, M. M., & Ngoepe, M. (2025). Ingesting digital archives into long-term storage system through free open-source software in South Africa. *Collection and Curation*, 44(1), 25-33.
- Siregar, Y. B. (2019). Digitalisasi arsip untuk efisiensi penyimpanan dan aksesibilitas. *Jurnal Administrasi dan Kesekretarian*, 4(1), 1-19.
- Sutrisno, S., & Christiani, L. (2019). Analisis autentikasi arsip digital hasil alih media di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(1), 248-257.
- Syukriah, S., Rosdiana, R., Asran, A., & Yusuf, E. (2024). Pendampingan teknologi informasi berkelanjutan dalam peningkatan pengembangan digitalisasi dibidang pelayanan publik dan kearsipan. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(1), 121-129.